

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal. Hukum Pidana 1. (Jakarta: Sinar Grafika). 2007.
- Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Penegakan Hukum. (Jakarta: Diadit Media). 2009.
- Agustina, Shinta, dkk. Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jakarta: LeIP). 2016.
- Ali, Mahrus. Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi. (Yogyakarta: UII Press). 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: PT. RajaGrafindo). 2004.
- Arief, Barda Nawawi. Kapita Selekta Hukum Pidana. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti). 2003.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Prenada Media Group). 2010.
- Bakhri, Syaiful. Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana. (Jakarta Selatan: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta). 2009.
- Chazawi, Adami. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. (Jakarta: RajaGrafindo Persada). 2016.
- Chazawi, Adami. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. (Malang: Media Nusa Creative). 2018.
- Djaja, Ermansjah. Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006. (Jakarta Timur: Sinar Grafika). 2010.
- Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Fuady. Hak Asasi Tersangka Pidana. (Jakarta: Prenada Media Group). 2015.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika). 2014.

- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. (Jakarta: Sinar Grafika). 2005.
- Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi. (Jakarta: Sinar Grafika). 2016.
- Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Jawa Timur: Bayu Media). 2006.
- Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana. (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia). 2012.
- Imron, Ali Dan Muhamad Iqbal. Hukum Pembuktian. (Tangerang Selatan: UNPAM Press). 2019.
- Irianto, Sulistyowati. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia). 2009.
- Isra, Saldi dan Eddy Hiariej. Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum). 2009.
- Marpaung, Leden. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan). (Jakarta: Sinar Grafika). 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta: Liberty). 2006.
- Muhammad, Rusli. Hukum Acara Pidana Kontemporer. (Bandung: Citra Aditya Bakti). 2007.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni). 2005.
- Pangabean, H.P. Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan yurisprudensi Indonesia. (Bandung: PT.Alumni). 2014.
- Pangaribuan, Aristo M.A., et al. Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Press). 2017.
- Prakoso, Djoko. Hukum Penitensier di Indonesia. (Yogyakarta: Liberty). 1988.
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. (Jakarta: Raja Grafindo). 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. (Bandung: Eresco). 1986.

- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. (Bandung: Mandar Maju). 2003.
- Soehartono, Irawan. Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainnya. (Bandung: Remaja Rosda Karya). 2002.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press). 1986.
- Subekti. Hukum Pembuktian. (Jakarta: Pradnya Paramitha). 2001.
- Sudarto. Hukum Dan Hukum Pidana. (Bandung: Alumni). 1977.
- Sudarto. Hukum Pidana 1. (Semarang: Yayasan Sudarto). 2009.
- Sumitro, Roni Hanitijo. Metodelogi Penelitian Hukum. (Jakarta: Ghalia). 2010.
- Suteki dan Taufani, Galang. Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik Cet.3. (Depok: RajaGrafindo Persada). 2020.
- Wijaya, Firman. Peradilan Korupsi Teori Dan Praktik. (Jakarta: Maharani Press). 2008.

B. Makalah, Artikel dan/atau Jurnal

- Alamri, Hadi. Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. "Lex Privatum", Volume 1 Nomor 1, Januari-Februari 2017.
- Arifin, Muhammad Zainul Dan Firman Muntaqo. Penerapan Prinsip Detournement De Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat Bumn Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. "Nurani", Vol. 18, No. 2. Desember 2018.
- Dahlan. Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian. "Jurnal Hukum Samudra Keadilan", Volume 10, Nomor 1. Januari-Juni 2015.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. (Jakarta: Komisi Pemberantasank Korupsi). 2006.

Prakoso, Tamala Sari Martha. Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 238/ Pid.B/2009/Pn.Kray Jo.Nomor 373/Pid.B 2010/Pt Smg Jo. Nomor:167k/ Pid.Sus/2011 Di Pengadilan Negeri Karanganyar), "Recidive", Volume 3, Nomor 1. Januari-April 2014.

Rogers, Maurice Dan Syawal Amry Siregar. Tinjauan Yuridis Penerapan Pidana Denda Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. "Jurnal Retenrum", Vol.1 No. 02. Februari 2020.

Sagita, Afrianto. Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. "Jurnal Hukum Respublica", Volume 17, Nomor 1, 2017.

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Mulyadi, Lilik. Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. (Disertasi Doktor Universitas Padjajaran: Bandung). 2007.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957.

Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957.

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958.

E. Putusan

Putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.